

NASKAH AKADEMIK KURIKULUM 2020
KKNI BERPEDOMAN SNPT DAN BERBASIS *UNITY OF SCIENCES*
IMPLEMENTASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji sertasyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Hidayah-Nya UIN Walisongo Semarang telah bertransformasi menjadi universitas yang berkembang dengan pesat. Setelah mendeklarasikan diri menjadi *green campus* dan universitas riset Islam terdepan berbasis pada *Unity of Sciences* untuk kemanusiaan dan peradaban, tentunya banyak hal yang harus ditingkatkan tak terkecuali prodi masing-masing fakultas yang dianggap sebagai garda terdepan. Salah satunya adalah Prodi Ilmu Hukum.

Menindaklanjuti kebijakan terkait Kampus Merdeka, revolusi industri 4.0 serta program *smartgreen campus*, maka Prodi Ilmu Hukum (IH) melakukan review kurikulum program studi berkaitan dengan pengembangan visi misi UIN yang selaras dengan kebijakan tersebut. Hasil review berwujud dokumen naskah akademik kurikulum Program Studi Ilmu Hukum berdasarkan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) dengan berpedoman Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan *Unity of Sciences*. Masukan dari berbagai pihak menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan kurikulum.

Semoga dokumen naskah akademik kurikulum ini bermanfaat dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Semarang, 26 Juni 2020

Tim Penyusun



TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Walisongo adalah sebagai berikut:

- A. Pengarah : Dr. H. Mohamad Arjal Imroni, M.Ag.
- B. Penanggungjawab : Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.
- C. Ketua : Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
- D. Sekretaris : Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
- E. Anggota :
 - Dr. Jafar Baehaqi, S.Ag., M.H.
 - Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
 - Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
 - Moh. Arifin, S.Ag., M.H.
 - Aang Asari, M.H.
 - Riza Fibriani, S.H., M.H.
 - Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
 - Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
 - Fenny Bintarawati, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Halaman Depan	1
Kata Pengantar	2
Tim Penyusun	3
Daftar Isi	4
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Pengembangan	6
C. Tujuan Pengembangan	7
D. Profil Program Studi	7
E. Visi, Misi, Tujuan	9
1. Visi, Misi, Tujuan Universitas	9
2. Visi, Misi, Tujuan Fakultas	10
3. Visi, Misi, Tujuan Program Studi	11
F. Analisis Kebutuhan	13
G. Profil Lulusan	18
H. Capaian Pembelajaran Lulusan	18
I. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah	22
J. Peta Kurikulum	36
K. Distribusi Mata Kuliah	38
L. Deskripsi Mata Kuliah	45
M. Proses Pembelajaran	65
N. Penilaian Hasil Belajar	66
O. Tenaga Pengajar	72
P. Sarana Prasarana	73
Q. Penjaminan Mutu	74
R. Penutup	74
S. Daftar Pustaka	75
Lampiran :	
Rencana Pembelajaran Semester	

A. Latar Belakang

IAIN Walisongotelahbermetamorfosismenjadi UIN Walisongo Semarang sudahdimulaisejak tahun 2015, bersamaandenganlahirnyaprodiIlmu Hukum. Prodi IlmuHukum sebagai salah satu prodibaru telah menyusun Kurikulum KKNI untukmenjaminkualitasmutu, yangdidasarkanpada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) danPermendikbud No. 049 Tahun 2014 TentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)sertaberpedoman pada VisiMisibaru UIN Walisongoyaitumenjadiperguruantinggiiberbasisrisetdengan*Unity of Sciences*pada tahun 2015.

PenyusunanKurikulum Prodi Ilmu Hukum, sejaktahun 2015 telahmengalamievaluasiberdasarkankesepakatanAsosiasi Prodi IlmuHukum sertakebutuhanlapanganpekerjaan, IPTEK dan masukanbeberapastakeholdersertakebijakan-kebijakanbaikdari internal maupunkebijakanpemerintah. Tuntutanperkembangan IPTEK dan kebijakanpendidikan yang harusterimplementasikandalam review kurikulumantara lainadalahtuntutan Era Industri pada tahun 2018, Merdeka BelajarKampus Merdeka (MBKM), dan juga tuntutanpengembangan*Green*Kampus UIN Walisongo Semarang.

Tuntutan Era Industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2019menyatakan bahwa rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan tentang: (1) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data; (2) literasi teknologi, kemampuan memahami aplikasi teknologi (3) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain; (4) pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0; (5) pemahaman ilmu untuk kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Tuntutan Merdeka BelajarKampus Merdeka (MBKM) berpedoman pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 TentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dijabarkan pada Buku Panduan Merdeka BelajarKampus Merdeka yang dikeluarkanDirektoratJendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020. MBKM mengamanahkanbahwaperguruantinggiwajibmemfasilitasihakbagimahasiswa (dapatdiambilatautidak) untuk: (1) Dapatmengambil SKS di luarperguruantinggi paling lama 2 semester atausetaradengan 40 SKS; (2) Dapatmengambil SKS di program studi

yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM adalah pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asisten mengajar di satuan Pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerjanya tatamati. Dalam implementasinya prodi Ilmu Hukum memilih beberapa bentuk kegiatan pembelajaran dengan sistem magang dan memberikan alternatif mata kuliah pilihan untuk menunjang kompetensi tambahan yang mendukung profil tambah dari prodi Ilmu Hukum.

Disamping alasan-alasan tersebut di atas, dan konsekuensi pertanggungjawaban penjaminan mutu pendidikan bagi mahasiswa maka Prodi Ilmu Hukum melakukan review dan penyusunan terhadap Kurikulum yang telah dibuat. Mekanisme penyusunan kurikulum ini tidak dilakukan secara mandiri oleh prodi namun melibatkan berbagai pihak seperti semua dosen Prodi/Jurusan Ilmu Hukum, *stakeholders*, dan mahasiswa. Hasil pembahasan dan penyusunan kurikulum akan ditetapkan melalui SK Dekan atau SK Rektor.

B. Landasan Pengembangan

Landasan pengembangan kurikulum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273B/P/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Semarang (termasuk di dalamnya Prodi Ilmu Hukum);
9. Panduan Pengembangan Kurikulum pada PTKI Tahun 2018;
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 - Ristekdikti 2019;
11. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
12. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka - Edisi 1 Tahun 2020;
13. Buku Pedoman Akademik UIN Walisongo Tahun 2020.

C. Tujuan Pengembangan

Maksud dari pengembangan kurikulum ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan perkuliahan di Prodi/Jurusan Ilmu Hukum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan *Unity of Sciences* sebagai paradigma visibaru di UIN Walisongo, implementasi tuntutan Era industri 4.0, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta pengembangan *Green Kampus* UIN Walisongo Semarang

Sedangkan tujuan pengembangan kurikulum ini adalah:

1. Menjamin tercapainya tujuan Prodi/Jurusan Ilmu Hukum yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menerapkan kesatuan ilmu, dan memperhatikan kearifan lokal untuk kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi Ilmu Hukum diselenggarakan dengan standar yang sama perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Menjamin untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang Prodi/Jurusan Ilmu Hukum dan berakhlak mulia dengan memiliki kompetensi tambahan yang menunjang profil lulusan.

D. Profil Program Studi

Perubahan Institut Agama Islam negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dan perubahan Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) membawa konsekuensi bertambahnya 9 prodi baru termasuk salah satunya prodi Ilmu Hukum. Lahirnya prodi Ilmu Hukum didasarkan pada kebutuhan riil di masyarakat. Kebutuhan tersebut terkait dengan problematika hukum yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan penyelesaian yang didasarkan pada kompetensi keilmuan di bidang hukum maupun kompetensi *relegiusitas* dan *local wisdom*. Ditengah-tengah maraknya prodi ilmu Hukum baik yang baru berdiri maupun yang lama yang secara kualitas sudah memadai, maka eksistensi prodi Ilmu Hukum berupaya untuk merespon kebutuhan tersebut dan menjadi prodi yang kredibel dan berkualitas.

Eksistensi Prodi ilmu Hukum secara operasional didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 273B/P/2014 tentang Izin penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Semarang tertanggal 9 Oktober 2014. Prodi ilmu Hukum FSH secara operasional mulai menyelenggarakan proses pembelajaran pada tahun 2015, dengan animo pendaftar yang sangat signifikan. Selanjutnya, prodi Ilmu Hukum FSH melakukan proses pembelajaran selama 4 semester, kemudian mengusulkan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Dengan pengusulan akreditasi tersebut, maka prodi Ilmu Hukum mendapatkan status terakreditasi pada tahun 2018 tertanggal 8 Agustus 2018 berdasarkan SK BAN PT Nomor :2195/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Kota Semarang dengan penilaian 319 (Peringkat terakreditasi B).

Berdasarkan penilaian akreditasi tersebut, memberikan kepercayaan kepada prodi Ilmu Hukum untuk meningkatkan penataan manajemen dalam segala aspek antara lain SDM, sarana prasarana termasuk kurikulum yang semula didesain hanya berbasis pada kurikulum KKNi, kemudian ditambah dengan dasar kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kurikulum Era Industri 4.0 dan *Smart Green Campus* untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Prodi ilmu Hukum FSH hadir untuk merespon kebutuhan akan Sarjana Hukum yang tidak saja mempunyai kompetensi dibidang hukum secara profesional tetapi juga integritas, moral, etika dan berakhlakul kharimah. Dengan demikian, mata kuliah dikemas dalam dalam satu kesatuan ilmu yang disebut dengan "*Unity of Sciences*" untuk kemanusiaan dan peradaban.

Kurikulum 2020 ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2020 dan seterusnya, dan kurikulum ini didesain dengan kompetensi yang lebih memadai dengan adanya 3 (tiga) peminatan yaitu Hukum Pidana, Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara. Peminatan tersebut, didukung dengan mata kuliah-mata kuliah peminatan yang wajib dipilih oleh mahasiswa sebanyak 5 (lima) mata kuliah. Disamping itu, setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan keinginannya (*passion*) berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Didukung dengan dosen yang profesional minimal berpendidikan S2, selebihnya S3 dan beberapa Profesor sesuai dengan kompetensinya.

Kompetensi lulusan Ilmu Hukum mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab, menguasai pengetahuan Ilmu Hukum dasar, memiliki ketrampilan hukum dan mampu menganalisis problematika hukum yang berkembang di masyarakat, mempunyai kemampuan berwirausaha, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki wawasan global, menguasai teknologi dan informasi serta mempunyai integritas, moral, etika dan berakhlakul kharimah. Sedangkan profil lulusan prodi Ilmu Hukum yaitu Hakim, Jaksa, Advokat, Mediator, DPR, *Legal Drafter* dll.

Prodi Ilmu Hukum didukung dengan sarana prasarana yang representatif antara lain ruang kuliah yang memadai, laboratorium hukum, perpustakaan serta sarana dan prasarana untuk kegiatan mahasiswa. Prodi Ilmu Hukum juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi antara lain para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), LBH, *Entrepreneur*, Notaris, Pengadilan Agama, KUA, Bawaslu dan instansi pemerintah maupun swasta yang lain.

Prestasi mahasiswa prodi ilmu Hukum antara lain kejuaraan Lomba Parade Cinta Tanah Air (2015), kejuaraan Debat Hukum Lingkungan tingkat Nasional (2016) sekaligus *The best speaker*, Lomba Debat Mahkamah Konstitusi (2016), Kejuaraan Debat Konstitusi MPR (2017), Lomba Vidio dan Blog Bank Indonesia (2017), Lomba Gendo Off Road (2017), Kejuaraan Debat Keterbukaan Informasi publik (2018), Lomba Debat Hukum UNNES (2019) dll.

E. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

“Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
- d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional;
- f. Mewujudkan tata pengelola lembaga profesional berstandar internasional.

Tujuan:

- a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
- b. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
- d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridharma perguruan tinggi.
- e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
- f. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional.

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas

Visi:

“Fakultas Syari’ah dan Hukum Terdepan dalam Riset Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum berbasis riset dan *unity of sciences* untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syari’ah dan hukum yang berakhlakul karimah;

- b. Mengembangkan riset di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum berbasis *unity of sciences*;
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum untuk *community development* berbasis riset;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional;
- e. Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu-ilmu syari'ah dan hukum;
- f. Mewujudkan tata kelola Fakultas Syari'ah dan Hukum yang profesional berstandar internasional.

Tujuan:

- a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
- b. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam memberikan solusi kepada masyarakat dalam bidang syari'ah dan hukum;
- c. Menghasilkan dan mengembangkan riset di bidang syari'ah dan hukum yang kontributif bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
- d. Pengabdian kepada masyarakat yang inovatif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

Visi :

"Prodi Terdepan dalam Riset dan Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis *Unity of Sciences* untuk Kemanusiaan dan Peradaban di tingkat internasional Tahun 2038".

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum berbasis *unity of sciences*.
- b. Melaksanakan riset terkait ilmu hukum dalam rangka mengatasi problematika hukum di masyarakat.
- c. Menggali dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu hukum atau permasalahan hukum di masyarakat.
- d. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum untuk peradaban dan kemanusiaan.



- e. Menjalankan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
- f. Melaksanakan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang hukum yang memiliki integritas, moral, etika dan akhlakul karimah.
- b. Menghasilkan riset di bidang hukum yang kontributif terhadap pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang inovatif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- d. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.



F. Analisis Kebutuhan

NO	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)	OPPORTUNITY (PELUANG)	THREAT (ANCAMAN)
1	Visi Prodi Ilmu Hukum sudah sangat jelas, hasil penjabaran dari visi fakultas dan visi UIN Walisongo, mempunyai paradigma ke masa depan, berkaitan dengan sesuatu yang diharapkan PS ilmu hukum	Visi Prodi Ilmu Hukum belum dapat dipahami secara utuh oleh beberapa <i>stakeholders</i> khususnya <i>civitas akademica</i> sebagai contoh salah satunya terkait dengan <i>unity of sciencess</i> yang memadukan keilmuan agama dan keilmuan hokum.	Visi Prodi Ilmu Hukum sudah dapat memberikan solusi dan tantangan khususnya terhadap permasalahan hukum	Pemahaman yang subyektif oleh calon mahasiswa dan mitra terhadap visi Prodi Ilmu Hukum
2	Telah terwujudnya kesinambungan dan harmonisasi antara visi dan misi, tujuan serta sasaran Prodi Ilmu Hukum, FSH dan UIN Walisongo	Visi Prodi Ilmu Hukum belum terelaborasi secara memadai dalam tataran konseptual. Meskipun sudah ada kejelasan alur berpikir dan orientasi, namun visi masih perlu upaya panjang dan serius terutama terkait <i>unity of sciencess</i> .	Visi tersebut menjelaskan tentang kepedulian(<i>awareness</i>) terhadap persoalan-persoalan hokum di masyarakat sekaligus merupakan harapan dan peluang para <i>stakeholder</i> yang menjadi modal kuat bagi Prodi Ilmu Hukum	Eksistensi Visi Prodi Ilmu Hukum yang sudah <i>esthablish</i> (mapan) dalam merespon kebutuhan dan tuntutan pasar.
2	Misi Prodi Ilmu Hukum telah menggambarkan pengembangan Tridharma perguruan Tinggi dan keselarasan rumusan	MisiProdi Ilmu Hukum belum dapat direspon secara detail oleh <i>stakeholder</i> sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar karena sulitnya menentukan	Misi Prodi Ilmu Hukum yang mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan pasar menjadi peluang yang besar untuk berkontribusi secara nyata	Tuntutan dan kebutuhan pasar serta teknologi yang semakin pesat perkembangannya



	dengan misi FSH dan UIN Walisongo.	skala prioritas.	dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat.	
4	Tujuan Prodi Ilmu Hukum telah menggambarkan profil kompetensi yang akan dibentuk oleh Prodi Ilmu Hukum	<i>Human resources</i> yang ada terbatas untuk merealisasikan tujuan tersebut, disamping fasilitas yang belum representative	Dalam merumuskan tujuan Prodi Ilmu Hukum melalui kerjasama dengan mitra terkait (<i>stakeholder</i>)	Semakin meningkatnya (dinamika dan varian) kebutuhan pasar terhadap profil kompetensi Prodi Ilmu Hukum
5	Sasaran Prodi Ilmu Hukum telah menggambarkan beberapa aktivitas yang mengarah pada strategi pencapaiannya	Sasaran Prodi Ilmu Hukum belum menggambarkan target yang terukur secara detail. Realisasi sasaran sangat terkait dengan kinerja SDM yang ada.	Adanya kerjasama dengan mitra terkait untuk merealisasikan sasaran Prodi Ilmu Hukum.	Dinamika dan varian tuntutan pasar yang menjadi sasaran Prodi Ilmu Hukum.
6	Eligibilitas Prodi Ilmu Hukum telah terakreditasi oleh BAN PT pada bulan Agustus 2018 dengan nilai 319/kategori B (Baik), sedangkan untuk Universitas Islam Negeri Walisongo telah memperoleh akreditasi A dengan nilai 368, hal ini menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas akreditasi prodi Ilmu Hukum dengan standar yang lebih baik	Akreditasi Prodi Ilmu Hukum yang masih B membuat terhambatnya pengembangan prodi.	Prodi Ilmu Hukum yang telah terakreditasi B membuat Prodi Ilmu Hukum mampu menarik input calon mahasiswa dan <i>stakeholder</i> untuk bekerjasama dan membangun jejaring untuk kepentingan pengembangan Prodi Ilmu Hukum.	Tuntutan dan kebutuhan pasar kerja yang menuntut eligibilitas akreditasi prodi dengan nilai A

7	Memiliki SDM yang sangat berkompeten, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum memiliki pendidikan minimal S2 dengan berbagai bidang keilmuan hokum dan fiqh. Terdapat 10 orang doctor dan 5 orang profesor. Sebagian lagi tengah menempuh pendidikan di program doctor. Semua tenaga dosen dan tenaga kependidikan juga memiliki kemampuan informasi dan teknologi yang memadai untuk menunjang kegiatan akademik.	Jumlah dosen yang berlatar pendidikan ilmu hukum masih terbatas dan tidak proporsional dengan jumlah mahasiswa yang ada di Prodi Ilmu Hukum. Jumlah dosen yang sudah menjadi doktor dan profesor juga masih sangat terbatas.	Masih banyak kesempatan bagi para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke program doktor dan menaikkan kepangkatan ke jenjang profesor. Masih terbuka peluang pula untuk merekrut tenaga dosen seluas-luasnya lulusan dari berbagai perguruan tinggi hukum.	Akan menghambat proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan, karena kebutuhan akan dosen yang proporsional dengan jumlah mahasiswa menjadi suatu idealitas yang harus diwujudkan.
8	Prodi Ilmu Hukum mempunyai kurikulum yang berbasis pada KKNI, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tuntutan Era industri 4.0 dan <i>Smart Green Campus (local wisdom)</i> . Kebijakan tersebut diwujudkan dalam mata	Kurikulum yang berbasis pada KKNI, Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tuntutan Era industri 4.0 dan <i>Smart Green Campus (local wisdom)</i> membutuhkan support dana, SDM, skill dan fasilitas yang memadai untuk selanjutnya dapat dibreakdown	Kurikulum yang berbasis pada KKNI, Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tuntutan Era industri 4.0 dan <i>Smart Green Campus (local wisdom)</i> memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan peminatan dalam Prodi Ilmu	Skill dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat tuntutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tuntutan Era industri 4.0 dan <i>Smart Green Campus (local wisdom)</i> .



	kuliah yang dikembangkan prodi Ilmu Hukum dengan 3 (tiga) peminatan yaitu Hukum Pidana, Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara.	dalam mata kuliah peminatan yang ada di Prodi Ilmu Hukum.	Hukum dengan menerapkan metode magang dan praktik. Oleh karena itu terbuka peluang untuk mengadakan kerjasama dan MoU dengan berbagai lembaga yang bergerak di bidang hukum.	
9	Para dosen di Prodi Ilmu Hukum melakukan kegiatan penelitian di bidang hukum, baik secara individu, kolektif, kolaboratif dengan mahasiswa maupun pihak lain/lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, yang ditulis dalam jurnal, baik nasional maupun internasional. Melakukan kajian-kajian aktual di bidang hukum secara tematik, dalam diskusi, seminar, baik regional, nasional maupun internasional.	Kurangnya diresponnya penawaran dana hibah penelitian yang ada dari berbagai cluster penelitian yang ada, sehingga penawaran penelitian yang ada tidak dapat diserap secara maksimal. Kurangnya semangat menulis dari para dosen yang akan dipublish dalam berbagai jurnal, baik nasional, terlebih internasional yang bereputasi scopus.	Masih terbukanya peluang yang besar bagi para dosen untuk memanfaatkan dana penelitian yang ditawarkan secara kompetitif dan memenuhi cluster-cluster penelitian yang belum terisi.	Akan menghambat terpenuhinya salah satu unsur tridharma perguruan tinggi, khususnya penelitian, sehingga dapat menghambat kepangkatan dosen menuju ke level guru besar/profesor.
10	Memberikan penyuluhan hukum, bantuan hukum dan pendampingan serta konsultasi hukum kepada	Tidak semua dosen memiliki kemampuan beracara dan bersidang di pengadilan.	Dapat bekerjasama dengan ikatan alumni dari berbagai kota yang tergabung dalam beberapa kantor advokat,	Keterbatasan jumlah dosen yang memiliki kemampuan beracara dapat menghambat pengembangan LPKBHI dan



	masyarakat (LPKBHI, POSBAKUM) yang telah terakreditasi A oleh Kementrian Hukum dan HAM.		untuk melakukan bersinergi membesarkan dan mengembangkan LPKBHI dan POSBAKUM di beberapa kota dan pengadilan.	POSBAKUM.
--	---	--	---	-----------

G. Profil Lulusan

1. Profil Lulusan

- a. Profil utam lulusan: Hakim, Jaksa, Advokat, dan Legal drafter, Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Profil tambahan lulusan: menjadi tenaga struktural dan administrasi di Kantor Urusan Agama/instansi pemerintah lainnya, tenaga administrasi di lembaga peradilan, Arbiter/Mediator/Negosiator, Edukator, Peneliti, Jurnalis, politikus, *Entrepreneur*.

H. Capaian Pembelajaran Lulusan

a. Capaian Pembelajaran Sikap

1) Capaian Pembelajaran Sikap Umum (CPSU)

- a) Bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan Negara;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik, dan otonomi akademik;

- l) Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya.

2) Capaian Pembelajaran Sikap Khusus (CPSK)

- a) Memiliki sikap, kepribadian, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- b) Memiliki kredibilitas dalam menghadapi problem-problem hukum;
- c) Menerapkan ajaran tentang sikap, kepribadian, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- d) Memiliki integritas, kredibilitas dan akuntabilitas dalam menghadapi problem-problem hukum dan memberikan alternatif solusi dalam kehidupan hukum.

b. Capaian Pembelajaran Pengetahuan

1) Capaian Pembelajaran Pengetahuan Umum (CPPU)

- a) Memiliki pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
- b) Memiliki pengetahuan tentang cara mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- c) Memiliki pengetahuan tentang komunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- d) Memiliki pengetahuan tentang cara berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
- e) Memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*;
- f) Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan;

- g) Memiliki pengetahuan terkait dengan cara mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.

2) Capaian Pembelajaran Pengetahuan Khusus (CPPK)

- a) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu Hukum baik materiil maupun formil;
- b) Menguasai azas-azas dan teori hukum, sumber hukum materiil dan formil serta hukum yang hidup di masyarakat;
- c) Memahami hakekat atau inti hukum dengan cara berfikir kritis, logis dan sistematis dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi dan peka terhadap problematika hukum di masyarakat.

3) Capaian Pembelajaran Pengetahuan Tambahan (CPPT)

- a) Memiliki pengetahuan menjadi tenaga struktural dan administrasi di Kantor Urusan Agama/instansi pemerintah lainnya, tenaga administrasi di lembaga peradilan, Arbiter/Mediator/Negosiator, Edukator, Peneliti, Jurnalis;
- b) Memiliki pengetahuan tambahan menjadi *Entrepreneur*.

c. Capaian Pembelajaran Keterampilan

1) Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (CPKU)

Lulusan

Program

Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah

- , tata cara, dan etikailmiahdalamrangkamenghasilkansolusi, gagasan, desain, ataukritikseni;
- d) Menyusun deskripsisaintifik, hasilkajiannyadalambentukskripsiataulaporantugasakhir, dan mengunggahnyaadalamperguruantinggi;
 - e) Mampu mengambilkeputusansecaratepat, dalamkontekspenjelasanmasalah di bidangkeahliannyaberdasarkanhasilanalisisinformasi dan data;
 - f) Mampu memelihara dan mengembangkanjaringanrjadenganpembimbing, kolega, dan sejawatbaik di dalammaupun di luarlembaganya;
 - g) Mampu bertanggungjawabataspencapaianhasilkerjakelompok dan melakukansupervisi dan evaluasiterhadappenyelesaianpekerjaan yang ditugaskankepadapekerja yang berada di bawahtanggungjawabnya;
 - h) Mampu melakukan proses evaluasidiriterhadapkelompokkerja yang berada di bawahtanggungjawabnya dan mampumengelolapembelajaransecaramandiri;
 - i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukanembali data untukmenjaminkesahihanmencegahplagiasi.

2) CapaianPembelajaranKetrampilanKhusus (CPKK)

- a) Mampu menerapkanpemikiranlogis, kritis, sistematis, dan inovatifdalamkontekspengembangan dan penerapanhukumsesuaidengankompetensinya;
- b) Mampu menganalisis, mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan etika profesi hukum serta mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis dan bertanggungjawab;
- c) Mampu menunjukkankinerjayang profesional, berkualitas dan akuntabeldalammenghadapiproblematahukum;
- d) Mampu menyusundeskripsisaintifik, hasilkajianilmuhukumdalambentukskripsiataulaporantugasakhirsecarajujur dan bertanggungjawab, dan mengunggahnyaadalamlamanperguruantinggi;

- e) Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks membuat berita acara perkara dalam persidangan, replik, duplik dalam penyelesaian hukum.

3) Capaian Pembelajaran Ketrampilan Tambahan (CPKT)

- Mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- Mampu melaksanakan ibadah mahdah dan ghair mahdah praktis yang digunakan di masyarakat;
- Mampu menerapkan teori-teori hukum dalam riset;
- Mampu menerapkan pengetahuan kewirausahaan termasuk *Technopreneurs* dalam menunjang profesi;

I. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah

a. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah Bahan Kajian Bidang Sikap Umum dan Pembobotan SKS

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS	SEMESTER
1	Profil Utama	CPSUa	Sikap Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap religius	a. Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	1
				b. Ilmu Fiqh	2	1
				c. Uloom al-Quran	2	1
				d. Uloom al-Hadits	2	1
				e. Qowa'id Fiqhiyah	2	2
				f. Fiqh Munakahat dan Mawaris	4	2
				g. Fiqh Muamalah	2	2
				h. Fiqh Jinayat	2	2
		CPSUb	Nilai-nilai agama, kemanusiaan, moral dan etika	a. Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	1
				b. Ilmu Fiqh	2	1
				c. Uloom al-Quran	2	1
				d. Uloom al-Hadits	2	1
				e. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum	2	5
				i. Fiqh Munakahat dan Mawaris	4	2

				j. Fiqh Muamalah f. Fiqh Jinayat	2 2	2 2
		CPSUc	Sikap peka terhadap mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1
		CPSUd	Sikap bangga dan cinta tanah air, nasionalisme dan tanggung jawab pada bangsa dan negara	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1
		CPSUe	Sikap menghargai terhadap keberagaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan b. Islam dan Moderasi Beragama	2 2	1 1
		CPSUf	Kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1
		CPSUg	Sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1
		CPSUh	Nilai-nilai, norma dan etika akademik	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1



		CPSUi	Sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	5
		CPSUj	Semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan	Kewirausahaan	2	5
		CPSUk	Nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	5
		CPSUI	Nilai-nilai, norma dan etika akademik serta sikap tanggung jawab terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya	Falsafah Kesatuan Ilmu (<i>Unity Of Sciences Philosophy</i>)	2	2
2	Profil Tambahan	Sama dengan profil utama	Sama dengan profil utama	Sama dengan profil utama		

b. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah Bahan Kajian Bidang Sikap Khusus dan Pembobotan SKS

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS	SEMESTER
1	Profil Utama	CPSKa	Ajaran tentang sikap, kepribadian, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara	a. Tauhid dan Akhlak Tasawuf b. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2 2	1 5



			dan bermasyarakat.			
		CPSKb	Kredibilitas dlm menghadapi problem hukum	a. Pengantar Ilmu Hukum b. Pengantar Hukum Indonesia c. Sosiologi Hukum d. Hukum Internasional	2 2 2 2	1 1 5 7
		CPSKc	Ajaran akhlak mulia (sidiq, amanah, tabligh, fatonah) dalam menjalankan tugas dan pekerjaan	Sejarah Peradaban Islam	2	2
		CPSKd	Nilai integritas, kredibilitas dan akuntabilitas dalam menghadapi problem-problem hukum dan memberikan alternatif solusi dalam kehidupan hukum	a. Pengantar Ilmu Hukum b. Pengantar Hukum Indonesia c. Hukum Perdata d. Hukum Pidana e. Hukum Tata Negara f. Ilmu Negara g. Hukum Internasional h. Hukum Acara (Kemahiran Litigasi) i. Kemahiran Non-litigasi(ADR)	2 2 4 4 2 2 2 4 2	1 1 3 3 3 2 7 4 5
2	Profil Tam bahan	Sama dengan profil 1	Sama dengan profil 1	Sama dengan profil 1		

**c. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah Bahan Kajian
Bidang Pengetahuan Umum dan Pembobotan SKS**

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS	SEMESTER
1	Profil Utama	CPPUa	Filsafat pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1
		CPPUb	Cara mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik)	a. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum b. Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	2 2	5 1
		CPPUc	Cara berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik)	a. Bahasa Indonesia a b. Bahasa Arab c. Bahasa Inggris	2 2 2	1 2 1
		CPPUd	Pengetahuan tentang cara berfikir kritis, logis, kreatif,	a. Filsafat Hukum b. Metodologi Penelitian dan	2 2	4 5

			inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik.	Penulisan Hukum c. Perancangan Undang-Undang d. Bahasa Indonesia e. Keadvokatan f. Hukum Acara (Kemahiran Litigasi) g. Kemahiran Nonlitigasi dan ADR	2 2 2 4 2	5 1 5 4 5
		CPPUe	Pengetahuan dasar-dasar keislaman	a. Tauhid dan Akhlak Tasawuf b. Ilmu Fiqh c. Ulum al-Quran d. Ulum al-Hadits e. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2 2 2 2 2	1 1 1 1 5
		CPPUf	Pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan	Falsafah Kesatuan Ilmu (<i>Unity Of Sciencies Philosophy</i>)	2	2
		CPPUg	Cara mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.	a. Kewirausahaan b. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2 2	5 5
2	Profil Tambahan	Sama dengan profil utama	Sama dengan profil utama	Sama dengan profil utama		



**d. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah Bahan Kajian
Bidang Pengetahuan Khusus dan Pembobotan SKS**

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS	SEMESTER
	Profil Utama	CPPKa CPPKb	Hukum Materiil	a. Pengantar Ilmu Hukum	2	1
				b. Pengantar Hukum Indonesia	2	1
				c. Hukum Perdata (I dan II)	4	3
				d. Hukum Pidana (I dan II)	4	3
				e. Hukum Perdata Islam Indonesia	4	3
				f. Hukum Tata Negara	2	4
				g. Hukum Administrasi Negara	2	3
			Hukum Formil	a. Hukum Ketenagakerjaan	2	4
				b. Hukum Adat		
				c. Hukum Agraria	2	2
				d. Hukum Dagang	2	3
				e. Hukum Internasional	2	3
				f. Hukum Perbankan	2	7
				g. Hukum Kekayaan Intelektual	2	5
				h. Hukum Perdata Islam Indonesia	4	7
				i. Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi	4	3
				j. Hukum Acara Perdata (I dan II)	4	4
				k. Hukum Acara Pidana (I dan II)	4	4

				l. Hukum Acara Peradilan Agama	2	4
				m. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4	4
		2. Memahami materi perancangan kontrak dan dapat mengimplementasikan dalam pembuatan kontrak	Perancangankont rak	PerancanganKont rak	2	6
		3. Memahamisistem peradilan di Indonesia	Sejarah perkembanganperadilan di Indonesia	SistemPeradilan di Indonesia	2	3
		4. Memahamimasalah hukum lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam	Hukum lingkungan dan pengelolaan SDA	Hukum Lingkungan dan Pengelolaan SDA	2	7
		5. Memahamihukum ketenagakerjaan dan problematikanya secara komprehensif	Hukum Ketenagakerjaan	Hukum Ketenagakerjaan	2	4
		6. Memahamiteori - teori kriminologi sebagai upaya penanggulangan kejahatan	Upaya penanggulangan sebab-sebab kejahatan berdasarkan teori kriminologi	Kriminologi	2	5
		7. Memahamiteori - teori hukum relevan dengan hak asasi manusia	Korelasi antara hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan HAM	2	7

		8. Memahami hukum dan kesetaraan gender	Nilai-nilai hukum dan kesetaraan gender	Hukum dan Kesetaraan Gender	2	6
		9. Memahami semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan berbasis teknologi	Kewirausahaan	Kewirausahaan	2	5
		10. Memahami beberapa mata kuliah peminatan hukum pidana (MK Pilihan hukum pidana)	a. Kapita Selekta Hukum Pidana b. Perbandingan Hukum Pidana c. Hukum Pidana khusus d. Viktimologi e. Sistem Peradilan Pidana f. Hukum Pidana Anak g. Politik Hukum Pidana h. Hukum Pidana Adat	a. Kapita Selekta Hukum Pidana b. Perbandingan Hukum Pidana c. Hukum Pidana khusus d. Viktimologi e. Sistem Peradilan Pidana f. Hukum Pidana Anak g. Politik Hukum Pidana h. Hukum Pidana Adat	2 2 2 2 2 2 2 2	6 6 6 6 6 6 6 6
		11. Memahami beberapa mata kuliah peminatan hukum Ekonomi (MK Pilihan hukum Ekonomi)	a. Kapita Selekta Hukum Ekonomi b. Hukum Ekonomi Syariah c. Hukum Inventasi dan Pasar Modal d. Hukum Kepailitan e. Hukum Jaminan f. Perbandingan Hukum Perdata g. Hukum Perlindungan	a. Kapita Selekta Hukum Ekonomi b. Hukum Ekonomi Syariah c. Hukum Inventasi dan Pasar Modal d. Hukum Kepailitan e. Hukum Jaminan f. Perbandingan Hukum Perdata g. Hukum Perlindungan	2 2 2 2 2 2 2	6 6 6 6 6 6 6

			Konsumen h. Penyelesaian Sengketa Bisnis	Konsumen h. Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	6
		12. Memahami be- berapa mata ku- liah peminatan hukum Tata Negara (MK Pilihan Hukum Tata Negara)	a. Kapita Selekta HTN b. Perbandingan HTN c. Hukum Pemilu dan Pilkada d. Hukum Otonomi Daerah e. Hukum Kepegawaian f. Hukum Keuangan Negara g. Hukum dan Kebijakan Publik h. Hukum dan Politik	a. Kapita Selekta HTN b. Perbandingan HTN c. Hukum Pemilu dan Pilkada d. Hukum Otonomi Daerah e. Hukum Kepegawaian f. Hukum Keuangan Negara g. Hukum dan Kebijakan Publik h. Hukum dan Politik	2 2 2 2 2 2 2 2	6 6 6 6 6 6 6 6
2	Profil Tam- bahan	Sama dengan profil utam- a	Sama dengan profil utam- a	Sama dengan profil utam- a		

**e. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah Bahan Kajian
Bidang Keterampilan Umum dan Pembobotan SKS**

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS	SEMESTER
1	Profil Utama	CPKUa	Menerapkan pemi- kiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kont- ek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkannya	a. Filsafat Hukum b. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2 2	4 5

			umaniora yang sesuai dengan bidangnya hukum.			
		CPKU _b	Kinerja mandiri, bermutu dan terukur	Kewirausahaan	2	5
		CPKU _c	Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni	a. Sosiologi Hukum b. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2 2	5 5
		CPKU _c	Deskripsi saintifik, hasil kaji dan lambent untuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	Tugas Akhir (Jurnal, Skripsi)	6	7
		CPKU _d	Keputusan dalam konteks penjasaran masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data	a. Hukum Acara (Kemahiran Litigasi) b. Kemahiran Non-litigasi (ADR) c. Keadvokatan	4 2 2	4 5 5
		CPKU _e	Pemeliharaan dan pengembangan jaringan kerja dengan pembimbing,	a. PPL b. KKL c. Hukum dan HAM	4 2 2	6 6 7

			kollega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya			
		CPKUf	Pertanggung-jawaban atas pencapaian hasil kerja kelompok, supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	a. Perancangan Undang-undang b. Perancangan Kontrak	2 2	5 6
		CPKUg	Proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan pengelolaan pembelajaran secara mandiri	Hukum dan Kesetaraan Gender	2	6
		CPKUh	Pendokumentasian, penyimpanan, pengamanahan, dan penemuan kembali data untuk menjamin keabsahan dan pencegahan plagiarisme	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	5
		CPKUi	Hukum materiil dan formil, studi kasus	Magang Klinik Hukum	2	6
2	Profil Tambahan	Sama dengan Profil Utama	Sama dengan Profil Utama	Sama dengan Profil Utama		

f. Pemetaan, Pengemasan dan Sebaran Mata Kuliah Bahan Kajian Bidang Ketrampilan Khusus dan Tambahan, Serta Pembobotan SKS

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS	SEMESTER
1	Profil Utama	CPKKa	Metodologi penelitian hukum dan strategi mempublikasikan hasil penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum.	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	5
		CPKKb	Keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan profesionalisme dan kode etik	a. Keadvokatan b. Hukum Acara pidana (Kemahiran Litigasi) c. Kemahiran Non-litigasi (ADR) d. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2 4 2 2	5 4 5 7
		CPKKc	Kinerja yang profesional, berkualitas dan akuntabel dalam menghadapi problematika hukum	a. Hukum Pajak b. Perancangan Undang-undang	2 2	5 5
		CPKKd	Deskriptif saintifik terhadap hasil kajian ilmu hukum dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir secara jujur dan bertanggung jawab dalam lapangan perguruan tinggi	a. Tugas akhir (Jurnal, skripsi) b. PPL c. KKL	6 4 2	7 6 6
		CPKKe	Ketrampilan meny	a. Bahasa	2	1

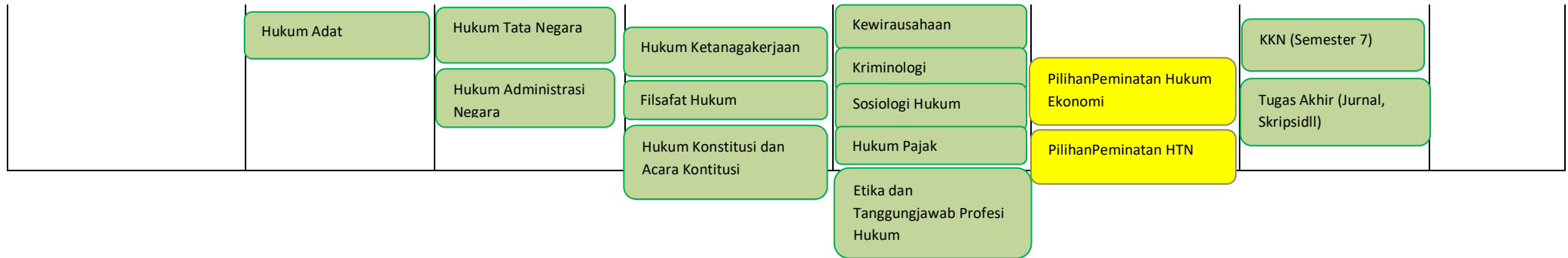


			ampaikangagasa nsecaratertulis, menampilkanpres entasisecaraefekt if dan mnggunakantekn ologiinformasisec arabertanggungja wab	Indonesia b. Bahasa Inggris c. Bahasa Arab	2 2	1 2
		CPKTa	Membaca dan menulis Al-Qur'an denganbaik dan benar	Ulum al-Quran	2	1
		CPKTb	Ibadahmahdhah dan ghairumahdhah	a. Tauhid dan Akhlaq Tasawuf b. Ilmu Fiqh	2 2	1 1
		CPKTc	Menerapkanteori- teorihukumdalamr iset	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	5
		CPKTd	Kewirausahaan	Kewirausahaan	2	5



J. Peta Kurikulum

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Karya Tulis ilmiah Bahasa Inggris Tauhid dan Akhlak Tasawuf Ilmu Fiqh Islam dan Moderasi Beragama	Bahasa Arab Falsafah Kesatuan Ilmu (Unity Of Sciences Philosophy) Fiqh Munakahat dan Mawaris Fiqh Muamalah Fiqh Jinayat Qowa'id Fiqhiyah Sejarah Peradaban Islam Ilmu Negara	Hukum Dagang Hukum Agraria Hukum Perdata Islam Indonesia Hukum Perdata (I & II) Hukum Pidana (I & II)	Hukum Acara Perdata (1,2 & Kemahiran Litigasi) Hukum Acara Pidana (I, II dan Kemahiran Litigasi) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Kemahiran Non Litigasi (ADR) Metode penelitian dan penulisan Hukum Rancangan Perundang-Undangan Hukum Perbankan	PPL (KUA, PN, PA, Kejaksaan) KKL Magang Klinik Hukum (Kemahiran Litigasi, Non Litigasi, Keadvokatan, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum) Pilihan Peminatan Hukum Pidana	Hukum Lingkungan dan pengelolaan SDA Hukum Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM Hukum Internasional Ilmu Falaq	



Keterangan:

- : Mata Kuliah Nasional
- : Mata Kuliah Universitas
- : Mata Kuliah Program Studi
- : Mata Kuliah Peminatan



K. Distribusi Mata kuliah

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER	PRASYARAT
MATA KULIAH WAJIB UMUM					
1	UIN 602001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2		
2	UIN 602002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	2		
3	UIN 602003	Islam dan Moderasi Beragama	2		
4	UIN 602004	Falsafah Kesatuan Ilmu (<i>Unity Of Sciences Philosophy</i>)	2		
5	UIN 602005	Ilmu Fiqh	2		
6	UIN 602006	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2		
7	UIN 602007	Bahasa Inggris	2		
8	UIN 602008	Bahasa Arab	2		
		JUMLAH	16		
MATA KULIAH WAJIB KEPRODIAN					
1	PIH-604009	Fiqh Munakahat dan Mawaris	4		
2	PIH-602010	Fiqh Muamalah	2		
3	PIH-602011	Fiqh Jinayat	2		
4	PIH-602012	Qowa'id Fiqhiyah	2		
5	PIH-602013	Ulumul Qur'an	2		
6	PIH-602014	Ulumul Hadist	2		
7	PIH-602015	Sejarah Peradaban Islam	2		
8	PIH-602016	Pengantar Ilmu Hukum	2		
9	PIH-602017	Pengantar Hukum Indonesia	2		
10	PIH-604018	Hukum Perdata Islam Indonesia	4		
11	PIH-602019	Ilmu Negara	2		
12	PIH-602020	Hukum Tata Negara	2		
13	PIH-602021	Hukum Administrasi Negara	2		
14	PIH-602022	Hukum Ketenagakerjaan	2		
15	PIH-602023	Hukum Adat	2		
16	PIH-602024	Hukum Agraria	2		
17	PIH-602025	Hukum Dagang	2		
18	PIH-602026	Hukum Internasional	2		
19	PIH-602027	Hukum Pajak	2		
20	PIH-602028	Hukum Perbankan	2		
21	PIH-602029	Hukum Lingkungan dan	2		

		Pengelolaan SDA			
22	PIH-604030	Hukum Perdata (I dan II)	4		
23	PIH-604031	Hukum Pidana (I dan II)	4		
24	PIH-602032	Kriminologi	2		
25	PIH-604033	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4		
26	PIH-604034	Hukum Acara Perdata (I, II dan Kemahiran Litigasi)	4		
27	PIH-604035	Hukum Acara Pidana (I, II dan Kemahiran Litigasi)	4		
28	PIH-602036	Hukum dan HAM	2		
29	PIH-604037	Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi	4		
30	PIH-602038	Hukum Kekayaan Intelektual	2		
31	PIH-602039	Hukum Acara Peradilan Agama	2		
32	PIH-602040	Sistem Peradilan di Indonesia	2		
33	PIH-602041	Sosiologi Hukum	2		
34	PIH-602042	Filsafat Hukum	2		
35	PIH-602043	Perancangan Perundang-Undangan	2		
36	PIH-602044	Kemahiran Non Litigasi (ADR)	2		
37	PIH-602045	Keadvokatan	2		
38	PIH-602046	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2		
39	PIH-602047	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2		
40	PIH-606048	Tugas akhir (jurnal, skripsi dll)	6		
MATA KULIAH KEPRODIAN MAGANG (MBKM)					
1	PIH-604049	PPL (KUA, PN, PA, Kejaksaan)	4		
2	PIH-602050	Ilmu Falak	2		
3	PIH-602051	Kewirausahaan	2		
4	PIH-604052	MagangKlinik Hukum (kemahiran litigasi, non litigasi, keadvokatan, Etika dan Tanggung JawabProfesi Hukum)	4		
5	PIH-604053	KKN	4		
6	PIH-602054	KKL	2		
JUMLAH SKS KESELURUHAN			132		

PEMINATAN HUKUM PIDANA					
No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Kategori	
1	PIH-602055	Kapita Selektta Hukum Pidana	2	P	
2	PIH-602056	Perbandingan Hukum Pidana	2	P	
3	PIH-602057	Hukum Pidana Khusus	2	P	
4	PIH-602058	Viktimologi	2	P	
5	PIH-602059	Sistem Peradilan Pidana	2	P	
6	PIH-602060	Hukum Pidana Anak	2	P	
7	PIH-602061	Politik Hukum Pidana	2	P	
8	PIH-602062	Hukum Pidana Adat	2	P	
9	PIH-602063	Perancangan Kontrak	2	P	
10	PIH-602064	Hukum dan Kesenjangan Gender	2	P	
		JUMLAH	20		
PEMINATAN HUKUM EKONOMI					
No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Kategori	
1	PIH-602065	Kapita Selektta Hukum Ekonomi	2	P	
2	PIH-602066	Hukum Ekonomi Syariah	2	P	
3	PIH-602067	Hukum Inventasi dan Pasar Modal	2	P	
4	PIH-602068	Hukum Kepailitan	2	P	
5	PIH-602069	Hukum Jaminan	2	P	
6	PIH-602070	Perbandingan Hukum Perdata	2	P	
7	PIH-602071	Hukum Perlindungan Konsumen	2	P	
8	PIH-602072	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	P	
9	PIH-602063	Perancangan Kontrak	2	P	
10	PIH-602064	Hukum dan Kesenjangan Gender	2	P	
		JUMLAH	20		
PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA					
No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Kategori	
1	PIH-602073	Kapita Selektta HTN	2	P	
2	PIH-602074	Perbandingan HTN	2	P	
3	PIH-602075	Hukum Pemilu dan Pilkada	2	P	
4	PIH-602076	Hukum Otonomi Daerah	2	P	

5	PIH-602077	Hukum Kepegawaian	2	P	
6	PIH-602078	Hukum Keuangan Negara	2	P	
7	PIH-602079	Hukum dan Kebijakan Publik	2	P	
8	PIH-602080	Hukum dan Politik	2	P	
9	PIH-602063	Perancangan Kontrak	2	P	
10	PIH-602064	Hukum dan Kesenjangan Gender	2	P	
		JUMLAH	20		
		JUMLAH TOTAL	192	186	

Catatan:

1. Mahasiswa Lulus Strata 1 wajib menempuh 144 SKS dari seluruh matakuliah yang disajikan sebanyak 192 SKS.
2. Mata kuliah Prodi Ilmu Hukum terdiri dari
 - a. MKWU (Nasional dan Universitas) sejumlah 16 SKS
 - b. Mata Kuliah Prodi sejumlah 132 SKS
 - c. Mata Kuliah pilihan sejumlah 60 SKS yang di ambil oleh Mahasiswa sejumlah 10 SKS atau 5 Mata Kuliah.

Distribusi Mata Kuliah Dalam Program Semester

Semester 1

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	UIN 602006	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	
2	UIN 602005	Ilmu Fiqh	2	
3	UIN 602001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	
4	PIH-602014	Ulumul Qur'an	2	
5	PIH-602015	Ulumul Hadist	2	
6	UIN 602007	Bahasa Inggris	2	
7	PIH-602017	Pengantar Ilmu Hukum	2	
8	PIH-602018	Pengantar Hukum Indonesia	2	
9	UIN 602003	Islam dan Moderasi Beragama	2	
10	UIN 602002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	2	
Jumlah			20	

Semester 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	PIH-604009	Fiqh Munakahat dan Mawaris	4	
3	PIH-602010	Fiqh Muamalah	2	
4	PIH-602011	Fiqh Jinayat	2	



5	PIH-602012	Qowa'id Fiqhiyah	2	
6	UIN 602008	Bahasa Arab	2	
7	PIH-602015	Sejarah Peradaban Islam	2	
8	PIH-602019	Ilmu Negara	2	
9	PIH-602023	Hukum Adat	2	
10.	UIN 602004	Falsafah Kesatuan Ilmu (<i>Unity Of Sciencies Philosophy</i>)	2	
11	PIH-604030	Hukum Perdata (I dan II)	4	
Jumlah			24	

Semester 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	PIH-602025	Hukum Dagang	2	
2	PIH-602024	Hukum Agraria	2	
3	PIH-604018	Hukum Perdata Islam Indonesia	4	
4	PIH-602026	Hukum Internasional	2	
5	PIH-604031	Hukum Pidana (I dan II)	4	
6	PIH-602021	Hukum Administrasi Negara	2	
7	PIH-602040	Sistem Peradilan di Indonesia	2	
8	PIH-602020	Hukum Tata Negara	2	
9	PIH-602042	Filsafat Hukum	2	
10	PIH-602022	Hukum Ketenagakerjaan	2	
Jumlah			24	

Semester 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	PIH-604034	Hukum Acara Perdata (I, II dan Kemahiran Litigasi)	4	
2	PIH-604035	Hukum Acara Pidana (I, II dan Kemahiran Litigasi)	4	
3	PIH-604033	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4	
4	PIH-602028	Hukum Perbankan	2	
5	PIH-602039	Hukum Acara Peradilan Agama	2	
6	PIH-602043	Perancangan Perundang-Undangan	2	
7	PIH-602041	Sosiologi Hukum	2	
8	PIH-604037	Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi	4	

Jumlah	24	
---------------	-----------	--

Semester 5

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	PIH-602045	Keadvokatan	2	
2	PIH-602044	Kemahiran Non Litigasi (ADR)	2	
3	PIH-602047	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	
4	PIH-602032	Kriminologi	2	
5	PIH-602046	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	
6	PIH-602038	Hukum Kekayaan Intelektual	2	
7	PIH-602036	Hukum dan HAM	2	
8	PIH-602050	Ilmu Falak	2	
9	PIH-602029	Hukum Lingkungan dan Pengelolaan SDA	2	
10	PIH-602027	Hukum Pajak	2	
11	PIH-602051	Kewirausahaan	2	
12	Kode sesuai dengan Peminatan di atas	Pilihan Peminatan Hukum Pidana/ Ekonomi/HTN	2	Memilih 1 mata kuliah pilihan
Jumlah			24	

Semester 6

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	PIH-604049	PPL (KUA, PN, PA, Kejaksaan)	4	Waktu libur semester (irisan semester genap/gasal)
2	PIH-602054	KKL	2	
3	Kode sesuai dengan Peminatan di atas	Pilihan Peminatan Hukum Pidana/ Ekonomi/HTN	8	Memilih 4 mata kuliah pilihan peminatan

4	PIH-604052	Magang Klinik Hukum (kemahiran litigasi, non litigasi, keadvokatan, Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum)	4	
Jumlah			18	

Semester 7

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	PIH-604053	KKN (SMSTER 7)	4	
2	PIH-606048	Tugas Akhir (Jurnal, Skripsidll)	6	
Jumlah			10	

Semester 8

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1				
2				
Jumlah				

Keterangan:

1. Mata Kuliah Pilihan MBKM

- Mata Kuliah Perancangan Perundang-undangan dilaksanakan di DPRD;
- PPL dilaksanakan di KUA, PN, PA, Kejaksaan;
- Magang Klinik Hukum dilaksanakan di berbagai Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah;
- KKL dilaksanakan di berbagai Institusi yang mendukung kompetensi Prodi Ilmu Hukum;
- Hukum Pidana Khusus dilaksanakan di ICW, KPK;
- Viktimologi dilaksanakan di RSUP Kariyati, RS Tugurejo;
- Hukum Pidana Anak dilaksanakan di LP Anak, Pengadilan Anak;
- Politik Hukum Pidana dilaksanakan di DPRD;
- Hukum dan Kesetaraan Gender dilaksanakan di LRC KJHAM, LBH APIK;
- Hukum Pidana Adat dilaksanakan di Komunitas Masyarakat Samin;
- Perancangan Kontrak dilaksanakan di berbagai kantor Notaris wilayah Jawa Tengah;

- l. Hukum Ekonomi Syariah dilaksanakan di berbagai Lembaga Keuangan Syariah;
- m. Hukum Kepailitan dilaksanakan di Kantor Kurator, Lelang di Pengadilan;
- n. Hukum Jaminan dilaksanakan di Perbankan Umum;
- o. Hukum Perlindungan Konsumen dilaksanakan di YLKI, Lembaga Perlindungan konsumen;
- p. Penyelesaian Sengketa Bisnis dilaksanakan di Basarnas, BANI;
- q. Hukum Pemilu dan Pilkada dilaksanakan di KPU, Bawaslu;
- r. Hukum Otonomi Daerah dilaksanakan di Pemda;
- s. Hukum Kepegawaian dilaksanakan di BKD;
- t. Hukum Keuangan Negara dilaksanakan di BI, Kementerian Keuangan;
- u. Hukum dan Kebijakan Publik dilaksanakan di Pattirol;
- v. Hukum dan Politik dilaksanakan di Fisip, Parpol, DPR/D.

L.Deskripsi Mata Kuliah

N O	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
1.	UIN 602001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	Mempelajari nilai dan prinsip-prinsip dasar negara pancasila sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara. sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga: Persatuan Indonesia, Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Mempelajari tentang identitas nasional, Negara, warga Negara, konstitusi, demokrasi, otonomi daerah, good-governance, hak asasi manusia, masyarakat madani dan integrasi nasional.
2.	UIN 602002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	2	Memahami filosofi, politik, dan konsep penggunaan Bahasa Indonesia sesuai dengan ragam uraiannya; Memahami konsep dan cara menulis ejaan, tanda baca, memilih dan menulis kata atau istilah, kalimat efektif, paragraf, konsep dan cara merujuk, menulis daftar rujukan

				dan menulis indeks sebagai bekal penerapan penggunaan BI dalam penulisan KI; Konsep dan cara menulis makalah formal (ilmiah) dan populer (tidak terikat dengan struktur formal), menulis artikel jurnal ilmiah dan jurnalistik, proposal penelitian dan proposal kegiatan, surat resmi, esai dan biodata.
3.	UIN 602003	Islam dan Moderasi Beragama	2	Mata kuliah ini mencakup penguatan peran politik umat yang kontributif bagi umat Islam dan protektif bagi empat komitmen kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) serta cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim kiri untuk menghasilkan perilaku civitas akademika yang moderat.
4.	UIN 602004	Falsafah Kesatuan Ilmu (<i>Unity Of Sciences Philosophy</i>)	2	Metode studi islam yang berbasis Falsafah ilmu yang berparadigma unity of sciences yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan
5.	UIN 602005	Ilmu Fiqh	2	Mata Kuliah Fiqh ibadah adalah suatu mata kuliah yang memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang berbagai pendapat para ahli fiqh empat madzhab dalam masalah "Thaharah, Sholat, dan Puasa" dari perspektif normatif, historis, dan praktik, agar mereka mampu memahami, memedomani dan mempraktikkan sesuai dengan pilihannya serta mampu menghindari truth claim yang dapat menyulut perpecahan.
6.	UIN 602006	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	Mempelajari konsep-konsep iman, islam dan ihsan, sejarah munculnya aliran dalam Islam baik khawarij, mu'tazilah, asy'ariyyah dan maturidiyyah, perkembangan teologi Islam modern serta agama dan sains modern. Dan Mempelajari Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak, etika-moral-susila-baik dan buruk,

				kebebasan-tanggung jawab dan hati nurani, hak-kewajiban-dan keadilan, akhlak Islami dan pembentukannya, arti-asal usul dan manfaat tasawuf, maqamat-hal-dan muhasabah, ma'rifat, al-fana- al-baqa'- al-ittihad- dan hulul, wihdat al-wujud dan insan kamil, tarikat dan problematika masyarakat modern.
7.	UIN 602007	Bahasa Inggris	2	Mempelajari bahasa Inggris yang berbasis pada listening, speaking, reading dan writing.
8.	UIN 602008	Bahasa Arab	2	Mempelajari bahasa Arab yang berbasis pada qira'ah, kitabah, istima dan kalam.
9.	PIH- 604009	Fiqh Munakahat dan Mawaris	4	<p>a. Mempelajari teori-teori fiqh munakahat yang meliputi; pengertian nikah, khitbah, mawani' al-nikah, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami isteri, batal dan putusnya pernikahan, macam-macam thalaq, khulu', nusyuz dan syiqaq, fasakh, dhihar, ila' dan li'an, masa iddah, hak rujuk dan hadlanah. Perkawinan kitabiyyah. Poligami, nikah hamil, nikah mut'ah.</p> <p>b. Mempelajari Definisi fiqh mawaris, kedudukan dan urgensinya, Dasar-dasar pewarisan masa Jahiliyah, Dasar-dasar penentuan ahli waris, Langkah-langkah politik dan pengaruhnya dalam hukum waris Islam, Hijrah dan Makkah sebagai dasar pewarisan, Pengangkatan anak (tabanni/adopsi) dan penentuan ahli waris, Fath Makkah dan pengaruhnya dalam formulasi hukum waris, Syarat dan rukun pewarisan, Hal-hal yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi, Ahli waris dan macam-macamnya, Al-furudl al-muqaddarah wa ashhabuha, Hajib dan Mahjub serta implikasinya, Masalah radd dan Aul, Beberapa masalah unik dalam kewarisan, gagasan pembaharuan dalam hukum kewarisan di Indonesia.</p>

10.	PIH-602010	Fiqh Muamalah	2	Asas-asas muamalah dalam Islam, Kepemilikan dalam Islam (<i>Nadzariyah al-Milkiyah</i>), Hak dalam Islam (<i>Nadzariyah al-Huquq</i>), Hak Allah dan hak manusia, Hak syakhshi dan hak 'ainy, Hak diyani dan hak qadha'iy, Harta dalam pandangan Islam (<i>nadzariyah al-amwal</i>), Pembagian harta dan implikasinya sebagai obyek akad, Subyek hukum dalam muamalah, Hukum perikatan dalam Islam (<i>nadzariyah al-'uqud</i>), Macam-macam akad : 'aqd al-musammah dan 'aqd ghair al-musammah.
11.	PIH-602011	Fiqh Jinayat	2	Mempelajari pengertian jinayah dan jarimah, sumber hukum pidana Islam, asas legalitas dalam hukum pidana Islam: unsur-unsur tindak pidana, azas-azas hukum pidana, tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam Islam serta klasifikasi tindak pidana dalam Islam. masa berlakunya aturan hukum pidana Islam, teori perbuatan pidana, kerjasama berbuat jarimah, pertang-gungjawaban pidana, macam-macam hukuman, gabungan hukuman, sebab-sebab hapusnya hukuman dan teori pembuktian.
12.	PIH-602012	Qowa'id Fiqhiyah	2	Mempelajari kaidah-kaidah Fiqh yang menjadi dasar dari pembentukan hukum. Pengertian qawa'id fiqhiyah dan ruang lingkupnya, tujuan dan manfaat mempelajarinya, faktor-faktor yang mendorong penyusunannya, qoidah asasiyah, qoidah-qoidah yang menjadi kesepakatan ulama ushul fiqih dan hubungan antara qawa'id fiqhiyah dan massail fiqhiyah.
13.	PIH-602013	Ulumul Qur'an	2	Mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an yang mencakup eksistensi al-Qur'an sebagai kalam Allah, identifikasi pokok-pokok dan isi kandungan al-Qur'an, ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an, kaidan dan metode tafsir al-Qur'an dan penerapannya, korelasi antara pernyataan

				ilmiah al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan, dinamika perkembangan modern dalam studi al-Qur'an.
14.	PIH-602014	Ulumul Hadist	2	Mempelajari ilmu-ilmu hadits baik dirayah maupun riwayat yang terkait dengan hadits dan hubungannya dengan al-Qur'an, Ilmu Hadits dan ruang lingkupnya, sejarah pembinaan dan penghimpunan hadits, klasifikasi hadits secara umum, permasalahan hadits sahih, hasan dan dhaif, ilmu rijalul hadits, ilmu jarh wa ta'dil, penelitian dan takhrij hadits, ilmu mukhtalif al-hadits, ilmu al-naskh wal mansukh fi al-hadits, ilmu asbab al-wurud al-hadits, dan kaidah-kaidah pemahaman hadits.
15.	PIH-602015	Sejarah Peradaban Islam	2	Mempelajari perkembangan peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad s.a.w. al-Khulafa ar-Rasyidun, Dinasty Umayyah Timur, Dinasty Umayyah Barat, Dinasty Abasiyyah, Dinasty kecil pada masa dinasty Abasiyyah, Tiga Kerajaan besar meliputi Dinasty turki Usmani, Dinasty Syafawi, Dinasty Mughal, Dunasti-sinasti Di Afrika, Islam di Asia Tenggara, Islam di Indonesia.
16.	PIH-602016	Pengantar Ilmu Hukum	2	Mempelajari pengertian hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, madzhab hukum, dan juga menerangkan tentang bagaimana cara menemukan hukum, serta penafsiran hukum yang baik dan benar. Di samping itu dieksploarasi tentang pembagian wilayah hukum yang berlaku dalam masyarakat, keterkaitan hukum dengan moralitas, dan teori-teori keadilan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum dalam masyarakat.
17.	PIH-602017	Pengantar Hukum Indonesia	2	Menjelaskan tata hukum yang berlaku di Indonesia, asas hukum, sumber hukum, pembagian hukum seperti hukum perdata, pidana, hukum adat, hukum daganag, hukum perburuhan, hukum TUN, hukum pajak, hukum agraria, dan lembag –

				lembaga terkait dengan penegakan hukum berikut dengan kewenangan lembaga tersebut.
18.	PIH-604018	Hukum Perdata Islam Indonesia	4	<p>Mempelajari tentang ketentuan hukum perdata Islam di Indonesia yang meliputi perkawinan dan kewarisan.</p> <p>Perkawinan terdiri dari pengantar (proses perumusan dan kekuatan hukumnya), Prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, peminangan, pencatatan perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, perkawinan wanita hamil, alasan syarat prosedur poligami, hak dan kewajiban suami-isteri, kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, harta kekayaan dalam perkawinan, asal-usul anak, pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak jika terjadi perceraian, perwalian, putus perkawinan dan akibat hukumnya, tata cara perceraian, waktu tunggu (masa iddah), tata cara rujuk, perkawinan pemeluk agama dan antar kewarga-negaraan, dan sanksi pidana dalam perkawinan.</p> <p>Kewarisan meliputi ketentuan hukum kewarisan, ahli waris dan kewajibannya atas harta peninggalan, penyebab dan penghalang saling mewarisi, bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian secara <i>auld an radd</i>, perdamaian dalam pembagian waris, system penggantian tempat (<i>plaatsvervulling</i>) dan kewarisan kolektif.</p>
19.	PIH-602019	Ilmu Negara	2	<p>Membicarakan negara dalam pengertian abstrak dari pengertian tersebut diuraikan tentang asal mula, hakikat, tujuan, kekuasaan, sistem pemerintahan dan bentuk negara, hak – hak asasi manusia, teori konstitusi dan hubungan antar negara.</p>

20.	PIH-602020	Hukum Tata Negara	2	Mempelajari hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dan seluk beluknya. Berdirinya sebuah Negara, system pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sumber-sumber hukum tata Negara, perubahankonstitusi Negara, kelembagaan Negara, otonomidaerah dan daerahotonom, pemilu, system kewarganegaraan, penegakan HAM, MahkamahKonstitusi, KPK dan system pertahanan Negara.
21.	PIH-602021	Hukum Administrasi Negara	2	Mempelajari hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara.
22.	PIH-602022	Hukum Ketenagakerjaan	2	Mempelajari masalahperburuhan dan ketenagakerjaan dari aspek hukum, asas, teori, praktik dan politik hukumnyasertapenyelesaiankasus-kasus yang menyangkuttentang, perencanaan dan penempatanenagakerjabaik di dalam maupun di luarnegeri, hubungan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan buruh, kesehatan dan keamanan kerja, pemutusan hubungan kerjasertapenyelesaian perselisihan
23.	PIH-602023	Hukum Adat	2	Mempelajari tentang asas-asas hukum adat meliputi istilah/pengertian, ruang lingkup, sistem, tujuan, dasar hukum, kedudukan, sifat dan corak, identifikasi sejarah yang meliputi perkembangan dan pergeserannya, urgensi serta pokok-pokok hukum adat yang meliputi hukum keluarga, perkawinan, waris, pidana, tata negara, tanah adat dan prospek hukum adat.
24.	PIH-602024	Hukum Agraria	2	Mempalajari isi dan kedudukan Hukum Agraria, memahami peranan Hukum Agraria dalam pembangunan Nasional dan permasalahannya.

25.	PIH-602025	Hukum Dagang	2	Mempelajari tentang dasar hukum dagang, sejarah hukum dagang, bentuk-bentuk perusahaan dan asuransi
26.	PIH-602026	Hukum Internasional	2	Mempelajarimasalah-masalahbersamadalamhubungansubyek-subyekhukuminternasionalmeliputihukump erdatainternasional (hukuminternasional yang mengaturhubunganhukumantarwarga Negara suatu negara dan warga negara dari negara lain/hukumantarbangsa, hukum public internasional (hukuminternasional yang mengatur negara satudengan negara yang lain dalamhubunganinternasional hukumantarbangsa.
27.	PIH-602027	Hukum Pajak	2	Mempelajari hukum pajak formil (pengertian pajak, fungsi pajak, hubungan hukum pajang dengan bidang hukum lainnya di indonesia, dasar-dasar pemungutan pajak dan dasar pembedaannya, asas-asas pemungutan pajak, yuridiksi pemungutan pajak, jenis pajak, utang pajak dan penagihan pajak, administrasi, keberatan dan banding pajak, peradilan dan sanksi pajak dan materiil (PPh, subyek dan obyek PPh, PPN, BPHTB, PPNBM, pajak dan retribusi kab/kota)
28.	PIH-602028	Hukum Perbankan	2	Mempelajaritentanglembagakeuangan, bank dan instrument pembayarannya, kegiatanusaha dan kebijakannya
29.	PIH-602029	Hukum Lingkungan dan Pengelolaan SDA	2	Pemahaman lingkungan hidup sebagai konsep holistik, isu global, kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan, uraian tentang implikasi pasal-pasal UULH dengan pendekatan hukum positif disertai studi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan (aspek administratif, keperdataan dan kepidanaan).
30.	PIH-604030	Hukum Perdata (I dan II)	4	Pengertian hukum perdata, ruang lingkup, hukum perdata materiil dan formal, hkum

				perdata di Indonesia, sistematika hukum perdata, asas-asas hukum perdata, sejarah terbentuknya KUHPdt/ BW di Indonesia, hukum perorangan, badan hukum, hukum keluarga, akibat perkawinan, bubarnya perkawinan. Hukum benda, hukum waris dan surat wasiat, warisan menurut BW (ahli waris, kedudukan ahli waris, pewarisan barang dan peninggalan anak yang lahir di luar kawin), hukum perjanjian, hukum pembuktian dan kedaluwarsa yang berlaku di Indonesia.
31.	PIH-604031	Hukum Pidana (I dan II)	4	Menjelaskan asas-asas dan teori hukum pidana materiil yang meliputi pengantar hukum pidana, tindak pidana, pengertian kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan (dolus, intent, opzet), dan kealpaan, alasan penghapusan pidana. Mempelajari hukum pidana terkait dengan masalah percobaan tindak pidana, penyertaan tindak pidana, penggabungan tindak pidana, alasan penghapusan penuntutan, alasan penghapusan pidana di dalam dan di luar KUHP.
32.	PIH-602032	Kriminologi	2	Mempelajari kejahatan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, menganalisis secara komprehensif tentang aspek kausa kejahatan dari berbagai teori kriminologi, tipe/karakteristik kejahatan dalam perkembangannya, menganalisis penggunaan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara manusiawi, pencatatan kejahatan dalam statistik kriminal.
33.	PIH-604033	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4	Mempelajari dasar-dasar PTUN, subyek dan obyek sengketa TUN, kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa, gugatan, permohonan, pembuktian, putusan upaya hukum dan eksekusi.
34.	PIH-604034	Hukum Acara Perdata (I, II dan	4	a. Mempelajari prosedur beracara dalam hukum perdata yang meliputi

		Kemahiran Litigasi)		<p>pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, kekuasaan hakim, cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan persidangan perdata, hukum pembuktian, alat-alat bukti, putusan, pememuan hukum dalam rangka putusan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan.</p> <p>b. Mempelajari hukum benda, hukum waris dan surat wasiat, warisan menurut BW (ahli waris, kedudukan ahli waris, kewarisan barang dan peninggalan anak yang lahir di luar kawin), hukum perjanjian, hukum pembuktian dan kadaluarsa yang berlaku di Indonesia.</p> <p>c. Mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme pengadilan (Litigasi) dan mengimplementasikannya untuk menganalisis masalah aktual dan selektif di bidang proses peradilan dan melakukan praktek pembuatan surat gugatan.</p>
35.	PIH-604035	Hukum Acara Pidana (I, II dan Kemahiran Litigasi)	4	<p>a. Mempelajari prosedur beracara dalam hukum pidana yang meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum acara pidana, asas-asas dan sejarah hukum acara pidana, pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara koneksitas, wewenang pengadilan untuk mengadili, ganti kerugian dan rehabilitasi, pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pembuktian, putusan pengadilan, upaya-upaya hukum (perlakuan (verset), banding, kasasi, peninjauan kembali dan alasannya), pelaksanaan putusan dan pengawasan.</p> <p>b. Mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme pengadilan (Litigasi) dan mengimplementasikannya untuk menganalisis masalah aktual dan selektif di bidang</p>

				proses peradilan dan praktek pembuatan surat dakwaan.
36.	PIH-602036	Hukum dan HAM	2	Mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar tentang konsep, standard normatif dan mekanisme praktis HAM di tingkat nasional atau internasional sehingga mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah HAM dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan lainnya.
37.	PIH-604037	Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi	4	<p>a. Mempelajari tentang dasar-dasar konstitusi dan hukum konstitusi, norma dasar, cita hukum dan konstitusi, teori konstitusi, eksistensi konstitusi, klasifikasi konstitusi, muatan konstitusi dan hukum konstitusi Indonesia.</p> <p>b. Mempelajari tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi.</p>
38.	PIH-602038	Hukum Kekayaan Intelektual	2	Mempelajari sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual yang terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Tata letak sirkuit terpadu. Mata kuliah ini juga mempelajari konvensi-konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI beserta penerapannya di Indonesia, membahas mengenai sejarah dan prinsip-prinsip umum HKI, mempelajari penggolongan HKI dan batasan ruang lingkupnya, seperti hak cipta dan hak terkait, paten, rahasia dagang, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Selain itu, juga membahas isu-isu seputar HKI, perkembangan-perkembangan HKI nasional maupun internasional, arti pentingnya HKI dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia, prosedur memperoleh hak yang timbul dari penciptaan, penggunaan merek dagang, invensi di

				bidang teknologi.
39.	PIH-602039	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Prosedur beracara dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia yang meliputi tugas dan wewenang Peradilan Agama, hukum acara Peradilan Agama (pengertian, asas-asas dan sumbernya) pengajuan gugatan/permohonan, penerimaan perkara (pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim dan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak), upaya menjamin hak (sita konservatoir, revindicatoir, marital, sita persamaan), hal-hal yang mungkin terjadi dalam persidangan (waking, intervensi, sengketa hak milik kebendaan, pemeriksaan insidentil, deden verzet), pembuktian, hukum acara yang diatur secara khusus, putusan hakim, upaya hukum dan pelaksanaan putusan.
40.	PIH-602040	Sistem Peradilan di Indonesia	2	Mahasiswa menjelaskan dan menerapkan pengertian, susunan, kekuasaan, prosedur perkara dan perkembangan peradilan-peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia.
41.	PIH-602041	Sosiologi Hukum	2	Mempelajari teori-teori hubungan interaksi dan interelasi dalam masyarakat yang meliputi hukum dan sosial masyarakat, persamaan dan perbedaan sistem hukum, hukum dan kekuasaan, kepastian hukum dan kesebandingan hukum, peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (<i>a tool of social engineering</i>).
42.	PIH-602042	Filsafat Hukum	2	Memahami berbagai konfigurasi pemikiran (paradigma) dalam filsafat hukum untuk menganalisis secara filosofis permasalahan-permasalahan hukum, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap sudut pandang.
43.	PIH-602043	Perancangan Perundang-	2	Mata kuliah ini menekankan pada keterampilan dalam membentuk peraturan

		Undangan		perundang-undangan meliputi landasan pembentukan UU, norma, asas, lembaga pembentuk dan fungsi perundang-undangan. Materi muatan, bahasa hukum dan istilah-istilah dalam perundang-undangan.
44.	PIH-602044	Kemahiran Non Litigasi (ADR)	2	Mempelajari penyelesaian sengketa hukum di luar jalur pengadilan (non litigasi) dan mengimplementasikannya untuk menganalisis masalah aktual dan selektif di bidang proses peradilan.
45.	PIH-602045	Keadvokatan	2	Sejarah perkembangan advokat di Indonesia, peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum di Indonesia, dasar-dasar keadvokatan, syarat-syarat menjadi advokat, organisasi advokat dan Lembaga bantuan di Indonesia, Syarat-syarat menjadi advokat, kode etik advokat, penegakan kode etik advokat, Peradi dan KAI, tradisi keadvokatan dalam Islam, advokat sebagai profesi.
46.	PIH-602046	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	Mempelajari nilai-nilai moral dan etik profesi serta mampu mengaplikasikan dan mengkritisi perilaku etika para profesional bisnis khususnya.
47.	PIH-602047	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	Mempelajari prinsip, prosedur dan teknis penelitian serta implementasi secara praktis dalam kegiatan penelitian dalam bidang hukum keluarga.
48.	PIH-606048	Tugas akhir (jurnal, skripsi dll)	6	Membuat penelitian hukum yang terkait dengan materi hukum pidana, perdata atau hukum tata negara.
49.	PIH-604049	PPL	4	Observasi dan simulasi persidangan, karya praktek hukum, simulasi ikrar wakaf dan perkawinan.
50.	PIH-602050	Ilmu Falak	2	Mempelajari teori-teori hisab, arah kiblat, waktu shalat dan hisab awal bulan qamariyah. Pengertian ilmu falak, bola bumi, bola langit, rumus-rumus segitiga bola, arah dan azimuth kiblat, bayang-bayang matahari ke arah kiblat, waktu shalat,

				fiqh hisab rukyah di Indonesia, penanggalan syamsiyah/masehi, qama-riyah, penanggalan qamariyah tahunsaka/ Jawa Islam, penanggalan qamariyah (ijtima'), dan penanggalan qamariyah (hisab hakiki sistem ephemeris).
51.	PIH-602051	Kewirausahaan	2	Ruang lingkup konsep <i>entrepreneurship</i> yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, yaitu orientasi nilai (value-oriented) dan orientasi tujuan (goal-oriented). Salah satu muatan penting yang perlu diperkenalkan kepada mahasiswa yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam <i>entrepreneurship</i> , yakni: kemandirian, berpikir kreatif, <i>soft-skill</i> , keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi, dan lainnya.
52.	PIH-604052	Magang Klinik Hukum	4	Mempelajari hukum formil dan hukum materiil serta studi kasus, yang menjadi bekal kepada mahasiswa agar mengenal realitas hukum, memiliki skill dan kemampuan praktek serta member bantuan kepada masyarakat.
53.	PIH-604053	KKN	4	Mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah dalam masyarakat.
54.	PIH-602054	KKL	2	Praktikum di lapangan yang terkait dengan lembaga-lembaga yang menangani permasalahan hukum keluarga.
55.	PIH-602055	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	Mempelajari masalah-masalah aktual dan selektif dalam hukum pidana meliputi asas legalitas, retroaktif, penggunaan sanksi administratif dalam hukum pidana, pidana penjara pendek, court management sebagai upaya penganggulangan hukum pidana, pendekatan komparatif <i>relegius</i> dan konsep KUHP, UU tipikor (perkembangan, efektifitasnya), <i>money laundering</i> , <i>cyber crime</i> .

56.	PIH-602056	Perbandingan Hukum Pidana	2	Mata kuliah ini membahas tentang perbandingan hukum pidana, perbandingan peraturan-peraturan hukum yang di ambil dari sistem-sistem yang berbeda. Perbandingan hukum pidana membahas mengenai perbandingan peraturan hukum pidana, prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang melandasi peraturan tersebut. Dalam rangka mengadakan perbandingan ini, perbandingan hukum pidana mempelajari Undang-Undang Hukum Pidana dari berbagai negara-negara luar yang dijadikan objek, secara garis besarnya saja.
57.	PIH-602057	Hukum Pidana Khusus	2	Mempelajari hukum pidana umum (<i>ius commune</i>) dalam KUHP dan hukum pidana khusus (<i>ius singular</i> atau <i>ius speciale</i>), UU khusus sebagai pelengkap dari UU yang dikodifikasikan (KUHP), macam-macam dan perkembangan tindak pidana khusus yang termuat dalam UU khusus, penekannya lebih kepada UU Tipikor.
58.	PIH-602058	Viktimologi	2	Mempelajari tentang korban, pengertian viktimologi, apa itu korban, mengapa seseorang menjadi korban (viktifikasi), viktifikasi struktural dan non struktural, peranan korban dalam tindak pidana, perlindungan hukum korban, hak dan kewajiban korban.urgentitas korban dan KUHPpendekatandalam mempelajari viktimologi, ruanglingkupnya, hubungan korban dan pelaku kejahatan, hubungan korban dengan masyarakat, eksistensi korban dalam sistem peradilan pidana, lembaga dan kepranataan.
59.	PIH-602059	Sistem Peradilan Pidana	2	Mempelajari bekerjanya sistem penanganan kejahatan pidana. Sebagai suatu sistem, bekerjanya peradilan pidana melibatkan berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara efisien untuk

				mewujudkan penegakan hukum atas ketentuan hukum pidana materiil dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya.
60.	PIH-602060	Hukum Pidana Anak	2	Mempelajari tentang perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif materiil (pengertian anak nakal, sanksi dari straafoort, straaftmaat dan straaftmodus), formil (proses dan sistem peradilan anak) dan pelaksanaan pidana berdasarkan UU Perlindungan dan Pengadilan Anak (bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim).
61.	PIH-602061	Politik Hukum Pidana	2	Mempelajari kebijakan politik hukum pidana Indonesia termasuk pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau konsep KUHP.
62.	PIH-602062	Hukum Pidana Adat	2	Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar pemahaman Hukum Pidana Adat, dasar hukum berlakunya Hukum Pidana Adat, karakteristik dan sifat Hukum Pidana Adat, perbedaan Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Barat (KUHP), ruang lingkup delik adat dan sanksi adat, beberapa putusan pengadilan menyangkut delik adat sehingga mahasiswa mampu mengetahui eksistensi kedudukan Hukum Pidana Adat sebagai salah satu hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat adat.
63.	PIH-602063	Perancangan Kontrak	2	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan.
64.	PIH-602064	Hukum dan Kesenjangan Gender	2	Mempelajari konsep kesetaraan gender dalam Islam yang mencakup konsep seks dan gender, ketimpangan gender dalam kehidupan masyarakat, patriarki, teori-teori feminisme,

				analisis gender dalam analisis kasus ketimpangan gender, serta identitas gender dalam kerangka hukum dan implementasi konsep kesetaraan dalam hukum di Indonesia.
65.	PIH-602065	Kapita Selekta Hukum Ekonomi	2	Mempelajari masalah-masalah selektif dan actual dalam hukum ekonomi.
66.	PIH-602066	Hukum Ekonomi Syariah	2	Mempelajari pengertian ekonomi syariah, dasar hukum, prinsip-prinsip ekonomi syariah, macam-macam produk ekonomi syariah baik perbankan syariah, asuransi syariah dan bisnis syariah.
67.	PIH-602067	Hukum Inventasi dan Pasar Modal	2	<p>a. Mempelajari berbagai teori investasi baik investasi pada aset finansial maupun pada aset riil yang rentan terhadap resiko dan ketidakpastian.</p> <p>b. Mempelajari hakekat pasar modal, peranan pasar modal bagi pembangunan, sumber hukum pasar modal, sejarah perkembangan pasar modal di dunia dan Indonesia, kebijakan hukum pasar modal, struktur kelembagaan pasar modal, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, bursa efek Indonesia, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, emiten, perusahaan publik dan reksa dana, lembaga penunjang pasar modal, instrument saham, obligasi, aspek hukum go public dan penawaran umum (public offering).</p>
68.	PIH-602068	Hukum Kepailitan	2	Mempelajari pengertian hukum kepailitan, dasar hukum kepailitan, sejarah singkat hukum kepailitan, para pihak yang terlibat proses kepailitan. Selain itu juga disampaikan materi tentang pengadilan niaga sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan kepailitan, dengan materi sebagai berikut: prinsip-prinsip hukum di pengadilan niaga,

				<p>kedudukan hukum acara dalam pengadilan niaga, permohonan pailit, penyampaian permohonan oleh panitera pengadilan niaga, penetapan hari sidang oleh pengadilan niaga, pemanggilan sidang pertama, pelaksana sidang, penunda sidang, putusan permohonan pailit, akibat yuridis dengan model pemberlakuan demi hukum (<i>by the operation of law</i>).</p> <p>Dalam materi hukum kepailitan juga dibahas tentang perangkat dari pengadilan niaga yang berupa kurator dan hakim pengawas, dengan rincian pokok bahasan sebagai berikut: yang dapat menjadi kurator, kedudukan kurator, tugas dan hak kurator, tata cara tugas kurator, curator menjual hak pailit, persetujuan pihak tertentu atas tindakan kurator, yang dapat menjadi hakim pengawas, kedudukan hakim pengawas, perincian kewenangan, tugas dan hak hakim pengawas, tata cara tugas hakim pengawas, kapan saat dinyatakan pailit, mekanisme stay, action paulina, pihak-pihak yang melakukan pemberesan harta pailit, prosedur pembagian harta pailit kepada kreditur dan juga dibahas mengenai mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).</p>
69.	PIH-602069	Hukum Jaminan	2	<p>Mempelajari objek jaminan berkaitan dengan Hukum benda, sedangkan praktek penjaminan (pemasangan hak jaminan) berkaitan dengan Hukum Perikatan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan.</p>

70.	PIH-602070	Perbandingan Hukum Perdata	2	<p>Perbandingan Hukum Perdata (PHP) merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang membandingkan karakteristik antar sistem-sistem hukum perdata dan lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia (Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat) dan sedikit di negara-negara dengan Sistem Hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Antara lain meliputi sejarah, tujuan, fungsi, proses Perbandingan Hukum Perdata, struktur, serta sumber hukumnya dengan menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Selanjutnya, menerapkan proses perbandingan (melihat persamaan dan perbedaan) hukum perdata tentang Orang dan Badan Hukum, Keluarga, Benda, Perjanjian, Waris dan Kapita Selekta Hukum Perdata. Lebih jauh lagi menjelaskan latar belakang, sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Perbandingan Hukum Perdata mempunyai banyak fungsi dan manfaat bagi berbagai bidang, antara lain: bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia; praktek dan pembinaan hukum, perencanaan hukum, serta sebagai ilmu pembantu dalam Hukum Internasional, pendidikan penasehatyuris, pembaharuan hukum.</p>
71.	PIH-602071	Hukum Perlindungan Konsumen	2	<p>Mata kuliah ini berisi tentang pengantar hukum perlindungan konsumen, pengertian hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, berbagai aspek hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, lembaga atau instansi dan perannya dalam perlindungan konsumen, isu-isu perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa</p>

				konsumen.
72.	PIH-602072	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu dalam penyelesaian sengketa bisnis, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, perbandingan metode penyelesaian sengketa bisnis, penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan, penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi, penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi, penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, dan konvensi penyelesaian sengketa bisnis.
73.	PIH-602073	Kapita Selekta HTN	2	Mata kuliah membahas hukum tata negara dan hal – hal aktual kenegaraan.
74.	PIH-602074	Perbandingan HTN	2	Mata kuliah ini membahas tentang sistem hukum, konstitusi dan konstitusionalisme, perbandingan ajaran trias politika, perbandingan kelembagaan negara, sistem pengisian lembaga negara, perbandingan sistem pemilu, perbandingan dan tugas wewenang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
75.	PIH-602075	Hukum Pemilu dan Pilkada	2	Mata kuliah yang menekankan pembelajaran pada aspek pengetahuan tentang teori, konsep dan hukum pemilihan umum di Indonesia. Mata kuliah ini juga mengkaji pelaksanaan amanat konstitusi dalam mengisi jabatan wakil rakyat pada lembaga negara Indonesia melalui mekanisme pemilihan umum, serta eksistensi partai politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
76.	PIH-602076	Hukum Otonomi Daerah	2	Mata kuliah ini membahas tentang konsep otonomi daerah, perspektif dan tujuan desentralisasi (politik, administratif, fiskal, ekonomi dan keseimbangan). Tujuan dari otonomi daerah sejarah perkembangan pemerintah daerah dan perkembangan perundang – undangan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah, elemen dasar entitas pemerintah

				daerah, pembagian kewenangan dan fungsi, isu – isu aktual, implementasi otonomi daerah dari berbagai perspektif.
77.	PIH-602077	Hukum Kepegawaian	2	Mata kuliah membahas perihal pegawai negeri dari berbagai aspek, yakni aspek kedudukan, penggolongan, hak dan kewajiban, prosedur pengadaan, pemberhentian serta aspek penyelesaian sengketa kepegawaian. Dari bahasan atau kajian berbagai aspek tersebut ditetapkan berbagai peraturan perundang – undangan baik yang bersifat pokok (Undang-Undang Pokok Kepegawaian) maupun bersifat pelaksanaan, yang terus menerus mengalami perubahan. Fenomena hukum kepegawaian ini muncul karena pengaruh faktor politik yang menghendaki faktor perubahan terutama pada aspek kedudukan pegawai negeri yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan dari tugas – tugas negara.
78.	PIH-602078	Hukum Keuangan Negara	2	Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian hukum keuangan negara, aspek legal kebijaksanaan, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dari anggaran dan pendapatan belanja negara serta aspek legal peraturan perundangan yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang keuangan negara.
79.	PIH-602079	Hukum dan Kebijakan Publik	2	Mata kuliah ini membahas tentang hukum dan perspektif hukum tentang kebijakan publik meliputi pemahaman dasar, kerangka hukum kebijakan publik, hukum sebagai instrumen kebijakan publik, pendekatan, dan partisipasi publik.
80.	PIH-602080	Hukum dan Politik	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang konfigurasi hukum dan politik. Asumsi dasarnya bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh tarik menarik kekuatan atau konfigurasi yang

				<p>melahirkannya. Dalam kajian ini, setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang politik serta institusi-institusi politik yang mengitarinya hendak dipahami pula oleh mahasiswa fakultas hukum guna memahami dampak dari interaksi hukum dan politik yang kadang kala sejalan, namun dalam banyak hal tidak sejalan, bahkan sering berseberangan.</p>
--	--	--	--	--

M. Proses Pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis

masalah, atau metode pembelajaran lain; dan berbasis riset serta dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

8. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

N. Penilaian Hasil Belajar

1. Prinsip Penilaian

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

- a. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non tes.
- b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.

- e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

4. Pelaksanaan Penilaian

- a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Penilaian dosen yang belum mendapatkan tugas secara mandiri (Asisten Ahli) harus mendapat bimbingan/ persetujuan/validasi dosen penanggungjawab mata kuliah.

5. Pelaporan Penilaian

- a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- b. Pelaporan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana didasarkan pada tabel berikut :

Huruf	Angka
A	4,00
B+	3,50 – 3,99
B	3,00 – 3,49
C+	2,50 – 2,99

C	2,00 – 2,49
D+	1,50 – 1,99
D	1,00 – 1,49
E+	0,05 – 0,99
E	0,00

- c. Ekuivalensi nilai program diploma dan sarjana (dalam skala 0-100) adalah sebagai berikut:

Angka	Huruf	Bobot
≥80	A	4,0
79	B+	3,9
78	B+	3,8
77	B+	3,7
76	B+	3,6
75	B+	3,5
74	B	3,4
73	B	3,3
72	B	3,2
71	B	3,1
70	B	3,0
69	C+	2,9
68	C+	2,8
67	C+	2,7
66	C+	2,6
65	C+	2,5
64	C	2,4
63	C	2,3
62	C	2,2
61	C	2,1
60	C	2,0
59	D+	1,9
58	D+	1,8
57	D+	1,7
56	D+	1,6
55	D+	1,5
54	D	1,4
53	D	1,3
52	D	1,2
51	D	1,1
50	D	1,0

Angka	Huruf	Bobot
≤49	E	0,0

- d. Pelaporan untuk mahasiswa program magister dan doktor didasarkan pada tabel berikut :

Huruf	Angka
A	3,75 – 4,00
A-	3,50 – 3,74
B+	3,25 – 3,49
B	3,00 – 3,24
C	> 2,99

- e. Ekuivalensi nilai program magister dan doktor adalah sebagai berikut:

Angka	Huruf	Bobot
90≤	A	4,00
89	A	3,95
88	A	3,90
87	A	3,85
86	A	3,80
85	A	3,75
84	A-	3,70
83	A-	3,65
82	A-	3,60
81	A-	3,55
80	A-	3,50
79	B+	3,45
78	B+	3,40
77	B+	3,35
76	B+	3,30
75	B+	3,25
74	B	3,20
73	B	3,15
72	B	3,10
71	B	3,05
70	B	3,00
69	C	2,90
68	C	2,80
67	C	2,70
66	C	2,60
65	C	2,50

Angka	Huruf	Bobot
64	C	2,40
63	C	2,30
62	C	2,20
61	C	2,10
60	C	2,00

- f. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- g. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- h. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

6. Kelulusan Mahasiswa

- a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol), dan untuk program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan mencapai nilai 2,70 (dua koma tujuh nol), program doktor, dan program doktor terapan mencapai nilai minimal 3,00 (tiga koma nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau Pujian (Cumlaude) dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	
	Program Diploma dan Program Sarjana	Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan
Pujian/Cumlaude	3,51 – 4,00	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50

- c. Predikat Pujian diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa studi sebagai berikut:
 - 1) ≤ 7 semester untuk diploma dan profesi

- 2) ≤ 9 semester untuk sarjana
- 3) ≤ 5 semester untuk magister dan magister terapan
- 4) ≤ 9 semester untuk doktor dan doktor terapan
- d. Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,50 bagi program diploma dan sarjana, lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa studi sebagaimana tersebut dalam huruf c mendapat predikat Sangat Memuaskan.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- f. Dosen dapat melakukan remediasi bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah.

7. Sumber Belajar

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran di Prodi Ilmu Hukum adalah:

- a. Sarana cetak, seperti: buku, brosur, majalah, surat kabar, poster, lembar informasi lepas, naskah brosur, peta, dan foto;
- b. Sarana elektronik: lab komputer;
- c. Lingkungan: alam, sosial, budaya, sekolah/madrasah, siswa dan *stakeholder*;
- d. Internet

O. Tenaga Pengajar

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Kompetensi
1	Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA 195907141986031004	Pembina Utama (IV/e)/ Guru Besar	Peradilan Agama
2	Prof. Dr. H. Muslich, MA 195606301981031003	Pembina Utama (IV/e)/ Guru Besar	Sejarah Peradaban Islam
3	Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI 195208051983031002	Pembina Utama Madya (IV/d)/ Guru Besar	Ilmu Hadits
4	Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc. 196208101991031003	Pembina Utama Madya (IV/d)/ Guru Besar	Ilmu Hukum
5	Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. 196701171997031001	Pembina Utama Muda (IV/c)/ Guru Besar	Ilmu Fiqih
6	Dra.Hj.Endang Rumaningsih, M.Hum. 19560101 198403 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)/ Lektor Kepala	Bahasa Indonesia

7	Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag 196308011992031001	Pembina Utama Muda (IV/c)/ Lektor Kepala	Ilmu Fiqih
8	Dr. H. Agus Nurhadi, MA. 196604071991031004	Pembina Tk. I (IV/b)/ Lektor Kepala	Ilmu Sosiologi
9	Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. 19691031 199503 1 002	Pembina Tk. I (IV/a)/ Lektor Kepala	Peradilan Agama
10	Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D. 19590606 198903 1 002	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Ushul Fiqh
11	Moh Arifin, S.Ag.,M.,Hum. 197110121997031002	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Ilmu Hukum
12	Dr. H. Ali Imron, M.Ag. 197307302003121003	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Hukum Perdata Islam di Indonesia
13	Maria Anna Muryani, SH.,M.H 196206011993032001	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Ilmu Hukum Perdata
14	Drs.H. Sahidin, M.Si. 196703211993031005	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Ilmu Fiqih
15	Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag 197701202005011005	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Fiqh/ Ushul Fiqh
16	Dr.H. Mashudi, M.Ag 196901212005011002	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Ahwal Al- Syakhsiyyah
17	Hj. Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum. 196312191999032001	Penata Tk. I (III/d)/ Lektor	Hukum Pidana
18	Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. 196703201993032001	Penata Tk. I (III/d)/ Lektor	Hukum Perdata
19	Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH 197308212000031002	Penata Tk. I (III/d)/ Lektor	Ilmu Hukum
20	Novita Dewi Masyithoh,SH, MH 197910222007012011	Penata Tk. I (III/d)/ Lektor	Hukum Perdata
21	Drs. H. Mohamad Solek, MA. 196603181993031004	Penata Tk. I (III/d)/ Lektor	Ilmu Fiqih
22	Anthin Lathifah, M.Ag. 19751107 200112 2 002	Penata (III/d)/ Lektor	Fiqh
23	Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. 19711101 200604 1 003	Penata (III/d)/Lektor	Hukum Perdata
24	Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. 19790202 200912 1 001	Penata (III/d)/Lektor	Fiqh
25	Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag. 19810622 200604 2 022	Penata (III/c)/Lektor	Fiqh

26	Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A. 19760627 200501 2 003	Penata (III/c)/Lektor	Tarjamah
27	Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.	Dosen Tetap Non PNS/ Lektor	Hukum Keluarga

P. Sarana dan Prasarana

Seluruh kegiatan akademik didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Laboratorium
2. Perpustakaan
3. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
4. Pusat Pengembangan Bahasa
5. Pusat Bisnis
6. Career Center
7. International Office
8. Galeri Seni
9. Pusat Kegiatan Mahasiswa
10. Poliklinik
11. Sport Center
12. Museum
13. Masjid
14. Parkir
15. Planetarium
16. Rumah Moderasi Beragama
17. Rumah Jurnal
18. Asrama mahasiswa
19. Ma'had Walisongo
20. Wisma Walisongo
21. Foodcourt
22. Production House
23. TV Walisongo
24. Radio
25. Pusat Layanan Konseling
26. Pusat Studi

27. Dan Sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tata kelola sarana dan prasarana pendukung perkuliahan diatur oleh masing-masing unit/lembaga pelaksana.

Q. Penjaminan Mutu

1. Dokumen Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.
2. Masing-masing bagian mutu dimaksud diatur dalam Keputusan Rektor.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu ditekankan pada pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Dalam rangka pengendalian dan pemenuhan standar mutu dilakukan monitoring evaluasi dan audit internal terhadap pelaksanaan standar yang ditetapkan.
5. Monitoring evaluasi dilakukan Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu.
6. Audit internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
7. Rapat tinjauan manajemen sebagai bagian dari proses penjaminan mutu internal dilakukan setiap setahun sekali setelah audit.

R. Penutup

Demikian Naskah Akademik Kurikulum 2020 "Kampus Merdeka dan Merdeka Kuliah" ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, pedoman-pedoman, dan berbagai referensi. Naskah akademik ini juga sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

S. Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Juklak KKNi di Perguruan Tinggi



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Lampirannya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi PT

De Carvalho, R., *The Humanistic Paradigm in Education. The Humanistic Psychologist*, 19(1), 1991 (88-104).

Delors, Jacques, *et al.*, *Learning: The Treasure Within*. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Australia: UNESCO Publishing, 1996.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 2014.

Panduan Ringkas –SPM- *Menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi*.

Sub Direktorat KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dikti, 2008.

Tim Belmana Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. 2014.